

**EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS
PENGADAAN LANGSUNG BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oleh :

Valentine Christy Unsong

NIM: 20043100



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN**

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISNALITAS TUGAS AKHIR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengendalian Intern	7
2.2 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15
2.3 Sistem Akuntansi	19
2.3.1 Pengertian Sistem	19
2.3.2 Sistem Akuntansi	19
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Waktu Dan Tempat Penelitian	27
3.2.1. Tempat Penelitian	27

3.2.2.	Waktu Penelitian.....	27
3.3.	Jenis Dan Sumber Data	28
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	28
3.4.1.	Observasi.....	28
3.4.2.	Interview/ Wawancara	29
3.4.3.	Teknik Dokumentasi.....	29
3.5.	Teknik Analisis Data.....	29
3.5.1.	Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	29
3.5.2.	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	30
3.5.3.	Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		31
4.1	Gambaran Umum	31
4.1.1	Lokasi Penelitian.....	31
4.1.2	Sejarah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.....	31
4.1.3	Visi dan Misi	32
4.1.4	Struktur Organisasi.....	32
4.1.5	Deskripsi Pekerjaan.....	33
4.2	Hasil Penelitian	35
4.2.1	Prosedur Permintaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sampai Persetujuan	35
4.3	Pembahasan	37
Evaluasi Sistem Akuntansi Pengendalian Intern Pengadaan Langsung Barang dan Jasa Pemerintah DPRD Provinsi Sulawesi Utara		37
BAB V PENUTUP.....		48
5.1	Kesimpulan	48
5.2	Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		50
LAMPIRAN.....		53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengendalian internal sangat penting bagi banyak aspek aktivitas lembaga pemerintah. Memanfaatkan teknologi yang digunakan pada instansi pemerintah tentunya dapat memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kegiatannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan. Sebagai salah satu upaya pemerintah adalah menata kembali sistem manajemen pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik adalah praktik menganalisis kekuatan berbagai urusan administrasi nasional dari tingkat politik, ekonomi, administrasi, dan lainnya. Era reformasi telah membawa beberapa perubahan dalam penyelenggaraan negara, salah satunya adalah pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi dengan adanya otonomi daerah, memungkinkan suatu daerah membentuk, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri, sehingga membentuk daerah yang mandiri. Hal ini berdampak positif bagi daerah tertinggal karena dapat secara mandiri memajukan pembangunan dan meningkatkan perekonomian nasional.

Untuk mengelolah pemerintahan dengan baik, pemerintah pusat dan daerah perlu memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaannya. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu kewenangan untuk mengelolah keuangan daerah sendiri serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah itu sendiri. Kewenangan pemerintah dalam mengelolah keuangan didasarkan pada sistem akuntansi pemerintahan yang merupakan suatu rangkaian dari sistem akuntansi pemerintah yang diatur dengan peraturan menteri keuangan ditingkat pemerintah pusat, dan peraturan ditingkat daerah. Standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Untuk mengetahui sebuah pengelolaan telah dilakukan

berdasarkan aturan yang berlaku maka dibutuhkan evaluasi sebagai penentu apakah hasil yang didapatkan sesuai atau tidak.

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan suatu nilai, evaluasi biasanya digunakan untuk menilai sebuah tujuan diadakannya kegiatan, apakah sudah tercapai atau belum dan apa saja masalah yang dihadapi saat merealisasikannya. Ada beberapa tahap dalam mengevaluasi, yang pertama melakukan penelitian awal, hal ini biasanya dilakukan dengan melihat kembali hasil-hasil dari kinerja kegiatan yang sudah pernah diadakan sebelumnya, yang kedua adalah uji coba yaitu evaluasi yang dilakukan untuk berbagai kegiatan dan instansi, termasuk instansi pemerintah dan non pemerintah. Dalam instansi pemerintah evaluasi biasanya digunakan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan untuk meninjau kembali target dan sasaran kegiatan tersebut sebagai pedoman merencanakan kegiatan yang akan diadakan selanjutnya.

Menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), pemerintah daerah (pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat. Peraturan ini mengikat semua pemerintah daerah dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu, dapat diandalkan, dan disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum adalah upaya nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat empat prosedur sistem akuntansi terdiri dari akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, setara kas, dan aset. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan tentang empat prosedur akuntansi ini: fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dibuat, dan uraian teknis prosedur.

Menurut undang-undang dan peraturan, sub sistem akuntansi pengeluaran kas uang persediaan (UP), sub sistem akuntansi pengeluaran kas ganti uang (GU), sub sistem akuntansi pengeluaran kas tambahan uang persediaan (TUP), dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas langsung (LS) terdiri dari empat sub sistem. Sistem pengendalian internal diperlukan, terutama dalam pemerintahan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan, terutama dalam hal pengeluaran.

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan pengendalian masih dilaksanakan dengan baik dan untuk memberikan rekomendasi tentang cara memperbaiki atau menindaklanjuti temuan tersebut untuk meningkatkan kegiatan yang terkait. Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas. Salah satunya adalah bagian yang tidak dirancang khusus untuk melakukan pengendalian internal. Kesalahan manusia, seperti kesalahan input data atau kesalahan interpretasi angka, dan masalah jaringan saat mengunggah laporan ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), situs resmi BPKP, termasuk masalah yang sering terjadi dalam pengeluaran kas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra yang sejajar Pemerintah Daerah. Karena ukurannya yang besar dan kompleks, para wakil rakyat tidak dapat bekerja sendirian. Akibatnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Sekretariat DPRD didirikan untuk melaksanakan fungsinya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat oleh PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Sekretariat DPRD Sulawesi Utara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. SKPD ini memiliki tugas dan

fungsi yang sangat berbeda dari SKPD lainnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Provinsi Sulawesi sering mengatur belanja untuk membeli barang dan jasa, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan sangat aktif dalam pengadaan barang dan jasa, tentu dalam hal ini Sekretariat DPRD berisiko mengalami kerugian keuangan negara jika tidak dilakukan pengendalian internal yang baik. Resiko ini juga terjadi dan meningkat karena adanya kecurangan, penyalahgunaan, dan kesalahan manusia atau dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk itu dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dibutuhkan pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No, 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, yang dapat membantu mengurangi risiko dalam pengadaan langsung barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Pada prosesnya tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa ada penyelewengan yang terjadi dalam setiap proses yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, melihat dengan fakta yang terjadi ada begitu banyak penyelewengan kekuasaan yang kemudian memanfaatkan fasilitas pengadaan untuk mengambil keuntungan. Untuk itu berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Evaluasi Sistem Akuntansi Pengendalian Internal Atas Pengadaan Langsung Barang Dan Jasa Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Sistem Akuntansi Pengendalian Internal Atas Pengadaan Langsung Barang Dan Jasa Pemerintahan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sistem akuntansi pengendalian internal atas pengadaan langsung barang dan jasa Pemerintahan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Tentunya dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap :

1.4.1 Kontribusi Bagi Pemerintah

1) Pengelolaan keuangan yang lebih Optimal

Dalam hal ini penelitian ini mampu memberikan manfaat pengetahuan bagi pengelolaan keuangan yang lebih optimal melalui Sistem Akuntansi tentunya dapat membantu Pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD untuk pengoptimalan tata kelola keuangan.

2) Transparansi dan Akuntabilitas yang tinggi

Dalam penelitian ini, manfaat yang didapatkan adalah pemerintah mampu menyajikan data yang transparan dalam hal pengelolaan keuangan, dan pengelolaan data keuangan yang lebih rapi dan teratur.

3) Peningkatan Reputasi

Dalam penelitian ini tentunya dengan hasil yang baik berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan akan memberikan citra yang baik terhadap kinerja pengelolaan anggaran oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

1.4.2 Manfaat Bagi Institusi

1) Meningkatkan Reputasi Akademik

Melalui penelitian ini, tentunya institusi mampu meningkatkan reputasinya dibidang Akademik, karena keberhasilan dalam penelitian ini menggunakan Sistem Akuntansi untuk mengevaluasi suatu pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa citra institut dalam bidang akuntansi sejauh ini terbilang unggul karena mampu menyajikan suatu penelitian yang relevan dan mampu menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut

2) Memberikan Kontribusi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini mampu memberi Kontribusi yang besar serta memberikan dampak perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya

dalam Ilmu Akuntansi, hasil penelitian yang diperoleh akan menjadi ilmu pengetahuan yang baru juga bagi dosen dan mahasiswa lainnya

3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Penelitian ini mampu menjabarkan kualitas pendidikan di Institut, melalui penelitian ini dapat dinilai bahwa keberhasilan penelitian semata-mata berdasarkan perolehan ilmu yang dijabarkan pada masa perkuliahan, sehingga membuat peneliti sukses dalam mencapai hasil dalam penelitian ini yang menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Institut ini sudah baik.

4) Membuka Peluang Kerjasama dengan Pihak Luar

Melalui penelitian ini, kedepannya tentu akan membuka peluang kerjasama antara institut dan Pemerintah ataupun perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli akuntansi yang sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, selain menguntungkan bagi mahasiswa, ini juga menandakan keberhasilan suatu Institut dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas.

1.4.3 Peneliti

1) Peningkatan Pengetahuan

Mampu memberikan suatu ilmu dan pengetahuan yang baru bagi peneliti dalam pemahaman tentang evaluasi menggunakan sistem akuntansi. Ini merupakan suatu pengetahuan khususnya didalam Ilmu Akuntansi

2) Pengembangan Keterampilan Penelitian

Melalui penelitian ini, kedepannya akan menjadi suatu karya yang menjadi referensi bagi peneliti lainnya

3) Kontribusi Akademik

Penelitian ini akan mampu memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan menjadi sumber referensi literatur bagi mahasiswa Akuntansi